

**PENGARUH IMPLEMENTASI DIPA SEBAGAI BAGIAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK**  
(Pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia)

<sup>\*</sup>Puteri Ayu Pratiwi, SE, M.Acc, Ak, CA

<sup>\*</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah pengaruh pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja melalui implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai bagian laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan akuntabilitas publik pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pusat Jakarta. Salah satu syarat agar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melaksanakan akuntabilitas publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah melakukan perubahan sistem penganggaran dengan mengubah implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam penelitian ini diharapkan implementasi anggaran berbasis kinerja melalui DIPA mampu meningkatkan akuntabilitas publik pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pusat Jakarta, sehingga tugas utama dalam melayani masyarakat luas dalam bidang media informasi khususnya televisi nasional Indonesia dapat terwujud. Penelitian ini dilakukan dengan survei melalui kuesioner yang dibagikan kepada Pengelola DIPA di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pusat Jakarta. Hasil analisis regresi linier sederhana yang dilakukan dari 78 responden menunjukkan bahwa implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan secara signifikan Akuntabilitas Publik yaitu konstanta sebesar 1,583 dan koefisien regresi sebesar 0,739.

*Kata kunci : Implementasi DIPA, Akuntabilitas Publik.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangannya sistem penganggaran di Indonesia mengalami perubahan sejak bergulirnya reformasi manajemen keuangan negara, yaitu dari penganggaran tradisional (*line item budgeting*) ke penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran tradisional (*line item budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dimana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan, sedangkan penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 163).

*Line item budgeting* mempunyai sejumlah karakteristik penting, dimana tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan *incremental* (kenaikan bertahap) dan tidak jarang dalam prakteknya memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting mengukur keberhasilan organisasi.

Dalam pelaksanaannya karakteristik tersebut, mempunyai sejumlah kelemahan. Dalam rezim pemerintahan yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

seringkali pelaksanaannya hanya sebatas aspek administratifnya saja. Dengan demikian sistem anggaran tidak memberikan informasi kinerja. Akibatnya efektifitas kinerja menjadi berkurang. Dalam menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan tanpa memperhatikan tingkat keberhasilan setiap program. Melalui pendekatan ini, analisis tentang tingkat keberhasilan setiap program tidak dilakukan. Akibatnya tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Selain itu apa yang sering terjadi dalam prakteknya adalah perilaku birokrat yang selalu berusaha menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan hasil dan kualitasnya. Kelemahan tersebut menyebabkan masalah yang dihadapi oleh sistem *line item budgeting* adalah *effectiveness problem, efficiency problem dan accountability problem*.

Karakteristik tersebut bertolak belakang dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Secara umum penganggaran berbasis kinerja mengandung tiga unsur pokok yaitu: pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatannya, pengukuran hasil kinerja, dan pelaporan program. Selain itu yang menjadi titik perhatian lebih ditekankan pengukuran hasil kerja, bukan pengawasan, dan setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output. Tujuan daripada penganggaran berbasis kinerja adalah menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kerja (Bastian, 2006: 166).

Pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintahan yang tertuang dalam APBN dilakukan dengan mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing satuan kerja untuk satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2011 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pelaksanaan ini disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah (Depkeu,2011). DIPA juga memuat informasi satuan-satuan terukur yang dapat dijadikan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

Dokumen sistem lama dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terdiri dari 3 (tiga) macam dokumen yaitu: a) Daftar Isian Kegiatan untuk pedoman pelaksanaan belanja anggaran rutin; b) Daftar Isian Proyek untuk pedoman pelaksanaan belanja pembangunan; dan c) Daftar Isian Kegiatan Suplement (DIKS) sebagai acuan dalam melaksanakan anggaran belanja yang sumbernya dari bagian Penerimaan Negeran Bukan Pajak (PNPB).

Ketiga dokumen tersebut kemudian diganti dengan sistem baru yaitu DIPA. Pelaksanaan DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban diharapkan dapat mencerminkan intergrasi dokumen masa lalu berbasis kinerja dan berorientasi pada kerangka pengeluaran berjangka menengah dan standar akuntansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem penganggaran menekankan beberapa prinsip yaitu apa yang dikenal dengan “ *The Three Es*” yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif ( Jones dan Pendlebury,dalam Bastian,2006:177). Selanjutnya muncul prinsip dalam sistem

penganggaran dalam masyarakat yaitu : demokratis, adil, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel (Shafritz dan Russell, dalam Bastian, 2006:178). Kemudian muncul konsep "good governance" yang sangat menekankan prinsip akuntabilitas (Agere, dalam Bastian, 2006:177).

Prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa syarat agar terwujudnya pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melaksanakan akuntabilitas publik. Apabila suatu lembaga pemerintahan memiliki akuntabilitas yang baik akan menopang peningkatan prinsip-prinsip penganggaran lainnya.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggung jawab dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menajadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada *stakeholder* dengan laporan tersebut (Mahsun, 2006:201). Pemerintahan baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu : hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Sebagai satuan kerja dibawah Kantor Menteri Negara BUMN, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dimulai mulai tahun 2006. Implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan pengukuran dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip penganggaran yang menekankan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara untuk akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai implementasi penganggaran berbasis kinerja melalui DIPA pada satuan kerja Pemerintah Pusat, dengan judul "Pengaruh Implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Bagian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Publik pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)". Tujuannya adalah menghasilkan informasi mengenai adanya pengaruh implementasi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai bagian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas publik pada Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2005:60). Menurut Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2006:163) adalah sebagai berikut: "Anggaran sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang."

Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Contoh penerapan anggaran sektor publik adalah (Bastian, 2006:164) sebagai berikut:

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*Budget of state*)
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

### Akuntabilitas Publik

Definisi Akuntabilitas Publik menurut Suryadhi yang dikutip dari <http://www.google.com> mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007) adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban."

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai Lembaga Pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*) (Mariam Budiardjo, 2000:29-34). Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan pengungkapan (*disclousure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mahsun, 2006:110).

Menurut Guy Peter dalam *The Politics of Bureaucracy* (2000:299) dan Bappenas dan Depdagri (2002:19) dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah menyatakan definisi akuntabilitas publik sebagai berikut: "Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggara pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan."

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Reformasi manajemen keuangan negara membawa perubahan sistem penganggaran dari sistem tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja sudah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Bastian, 2006:175):

- 1) Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.
- 2) Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum.
- 4) Bermoral Tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
- 5) Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya.
- 6) Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.

Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja menekankan beberapa prinsip yang dikenal dengan konsep *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,2005)

Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2005:59-60) menyatakan bahwa *United Nation Development Program* (UNDP) memberikan karakteristik yang menjadai prinsip dalam pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- 1) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transperency*. Transparansi dibangun atas kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap melayani *stakeholder*.
- 5) *Consesus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- 7) *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna(efisien) dan berhasil guna(efektif).
- 8) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- 9) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik tersebut paling tidak ada prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi *good governance*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan keuangan Negara dalam pelaksanaan anggaran menekankan prinsip sebagai berikut (Bastian,2006:175):

- 1) Akuntabilitas hasil untuk DPR dan masyarakat
- 2) Transparansi menyeluruh pada seluruh transaksi pemerintah
- 3) Pemberdayaan pemimpin yang professional untuk mencapai kinerja lembaga yang optimal
- 4) Pengawasan yang kuat, professional, dan independen oleh BPK dan penghapusan duplikasi fungsi-fungsi pemeriksaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mengemukakan bahwa syarat agar terwujudnya pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melaksanakan akuntabilitas publik. Apabila suatu lembaga pemerintahan memiliki akuntabilitas publik yang akan dapat menopang prinsip-prinsip lainnya. DIPA merupakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Dengan demikian implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban juga harus mencerminkan prinsip tersebut, supaya pelaksanaan *good governance* melalui prinsip akuntabilitas publik dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas maka model yang dikembangkan mengenai pengaruh implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas publik sebagai berikut :



Gambar 1.1 Model Penelitian. Pengaruh Implementasi DIPA terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan model yang dikembangkan dapat diperoleh gambaran implementasi penganggaran berbasis kinerja melalui DIPA mempunyai pengaruh terhadap prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas publik. Tercipta *good governance* melalui akuntabilitas publik akan tercapai jika implementasi DIPA di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dilaksanakan dengan baik. Penelitian yang pernah dilakukan mengenai implementasi anggaran dilakukan oleh Dwiningsih(2006)

dalam penelitiannya bahwa hasil pelaksanaan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Selanjutnya Teodorus (2007) dalam penelitiannya memperoleh bahwa hasil penerapan anggaran berbasis kinerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka semakin akuntabel hasil yang diperoleh.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan obyek/subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya (Cooper,2006:38). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Pengelola DIPA di Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI).

### **Penentuan Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel yang ditentukan seharusnya dapat mewakili karakteristik dari populasi yang diambil. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yang adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Cooper,2006:38-40). Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah Kepala dan staff bagian Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Kinerja, Kepala dan Staff Bagian Anggaran dan Kepala dan Staff bagian Akuntansi dan Perpajakan.

## **VARIABEL PENELITIAN**

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati, variabel menjadi suatu kelompok dalam objek penelitian. Kelompok ini akan bervariasi bila terjadi pada sekelompok orang atau objek yang diambil secara random. Variabel merupakan komponen penelitian yang memiliki variasi. Dengan mengamati secara seksama ukuran-ukuran tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga untuk data yang diperoleh dapat menunjang penyusunan laporan penelitian. Data tersebut selanjutnya diolah, dianalisis, dan diproses dengan bantuan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya. Dari objek tersebut ditarik kesimpulan secara umum mengenai masalah yang diteliti.

Menurut hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi :

1. Variabel *Independen* ( variabel bebas)  
Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, input, prediktor atau variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2. Variabel *Dependen* ( variabel terikat )  
Variabel ini sering disebut variabel respon, output, atau variabel terikat. Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Sesuai dengan judul skripsi yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu “Pengaruh Implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Bagian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Publik”, maka terdapat dua variabel penelitian yaitu :

- Implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Laporan Pertanggungjawaban sebagai variabel *independen* / bebas (X) adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dengan prinsip-prinsip anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Akuntabilitas Publik sebagai variabel *dependen* / tidak bebas (Y) adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **METODE ANALISIS DATA**

### **Deskripsi Statistik**

Deskripsi statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, sebagai acuan untuk melihat karakteristik data.

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Validitas digunakan sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2001:50). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas instrument penelitian dapat dilakukan dengan metode Bivariate Pearson (Kolerasi Produk Momen Pearson) dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item dengan skor total (Priyantno, 2008:32). Asumsi validitas terpenuhi jika skor item masing-masing butir pertanyaan adalah signifikan secara statistik dan berkolerasi positif dengan skor total pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yang dikehendaki (Purbayu, 2005:38).

Realibilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2005:62). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal dengan koefisien Cronbach's alpha.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, kedua variabel penelitian perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk pengujian normalitas peneliti menggunakan grafik distribusi.

Grafik distribusi ditunjukkan dengan kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) kurva. Aturan dalam kurtosis adalah nilai rasio skewness dan kurtosis berada antara nilai minus dua (-2) dan plus dua (+2) maka bisa diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Jika rasio berada dibawah nilai 2 maka bisa dikatakan bahwa bentuk grafik distribusi data adalah miring ke kanan. Sedangkan jika rasio berada diatas nilai +2

maka bisa dikatakan bahwa bentuk grafik distribusi data adalah menceng ke kiri (Purbayu, 2005:40).

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengolah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner digunakan metode statistik analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 19.0. Metode statistik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan fungsional atau kausal antara variabel independen dan variabel dependen beserta pengaruh signifikannya seperti yang dikembangkan ke dalam hipotesis

Regresi linier sederhana dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

- Y' = Akuntabilitas Publik (nilai yang diprediksikan)  
X = Implementasi DIPA  
a = Konstanta Regresi (nilai Y apabila X= 0)  
b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji signifikan dari koefisien regresi untuk mengambil kesimpulan menerima atau menolak hipotesis. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut (Lind, 2005:103):

1. Menentukan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>)
2. Menentukan tingkat signifikan/tingkat kesalahan ( $\alpha$ )
3. Melakukan uji statistik dengan menghitung uji statistik dan statistik hitung
4. Memformulasikan hasil perhitungan dengan aturan dalam pengambilan keputusan
5. Pembuatan keputusan menolak atau tidak menolak H<sub>0</sub> dengan membandingkan nilai uji statistik dengan daerah penerimaan H<sub>0</sub> (nilai statistik tabel)

Dalam melakukan uji statistik ada dua pengujian yang dapat dipakai yaitu uji t dan uji F. Uji t digunakan apabila menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, sedangkan uji F digunakan apabila menggunakan metode analisis regresi berganda (Iswardono, 2001:67)

Langkah-langkah pengujian hipotesis ini dilakukan dengan aplikasi SPSS 19.0. Aplikasi ini akan memudahkan menyelesaikan pengujian hipotesis dengan cepat dan akurat serta menghindari kesalahan apabila digunakan dalam perhitungan manual. Program aplikasi akan menghasilkan *output* yang lengkap dan baik untuk nilai t-hitung dan p-value. Keputusan untuk menolak dan tidak menolak hipotesis berdasarkan pada perbandingan antara t-hitung dengan nilai t-tabel atau nilai p-value tersebut dengan signifikan yang ditetapkan oleh peneliti sebagai dasar kriteria pengambilan keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Hipotesis

#### 4.2.1 Hasil Deskripsi Statistik

Deskripsi statistik dari jawaban responden atas variabel-variabel penelitian dalam kuesioner dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Deskripsi Statistik dengan SPSS 19.0**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
IMPLEMENTASIDIPA	78	28.00	50.00	38.2308	4.13387	17.089
AKUNTABILITASPUBLIK	78	19.00	40.00	29.9231	4.25416	18.098
Valid N (listwise)	78					

#### Statistics

		IMPLEMENTASIDIP A	AKUNTABILITASPUB LIK
N	Valid	78	78
	Missing	0	0
Mean		38.2308	29.9231
Median		38.0000	30.0000
Mode		38.00	32.00
Std. Deviation		4.13387	4.25416
Variance		17.089	18.098
Skewness		.183	-.248
Std. Error of Skewness		.272	.272
Kurtosis		.885	.153
Std. Error of Kurtosis		.538	.538
Range		22.00	21.00
Minimum		28.00	19.00
Maximum		50.00	40.00
Sum		2982.00	2334.00
Percentiles	25	36.0000	28.0000
	50	38.0000	30.0000
	75	40.0000	32.0000

Implementasi DIPA, jumlah pertanyaan untuk variabel X ini sebanyak 10 pertanyaan, dari hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa variabel implementasi DIPA pada kisaran 28 - 50 sedangkan kisaran teoritisnya 10 - 50. Total skor jawaban dari responden adalah 38,23 adengan deviasi standar 4,133. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai implementasi DIPA telah cukup memenuhi ketentuan-ketentuan yang

berlaku dari teoritis. Jawaban responden untuk Akuntabilitas Publik yang merupakan variabel Y yaitu berada di kisaran 19 - 40 sedangkan kisaran teoritis 8 - 40. Total skor Jawaban responden adalah 29,92 dengan deviasi standar 4,254. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik baik.

### Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas

Hasil uji validitas variabel Implementasi DIPA yang merupakan variabel X disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Hasil Uji Validitas Dengan Metode Korelasi Pearson Implementasi DIPA  
(Sumber: Hasil olah Data Penulis, 2017)

Butir Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
1	0,385	Valid
2	0,564	Valid
3	0,520	Valid
4	0,563	Valid
5	0,679	Valid
6	0,490	Valid
7	0,485	Valid
8	0,573	Valid
9	0,636	Valid
10	0,598	Valid

Dari hasil analisis antara masing-masing skor pertanyaan hasil yang bisa diperoleh adalah:

- Koefisien korelasi untuk pertanyaan 1 sampai dengan 10 nilainya lebih besar dari 0,223 (tabel r dengan  $n = 78$ ) sehingga dapat disimpulkan butir instrument tersebut valid
- Semua butir pertanyaan berkorelasi positif maka kesimpulan yang bisa diambil adalah kuesioner implementasi DIPA memiliki instrumen yang valid.

Hasil uji validitas variabel akuntabilitas publik disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Hasil Uji Validitas Dengan Metode Korelasi Pearson Akuntabilitas Publik  
 (Sumber: Hasil olah Data Penulis, 2017)

Butir Pertanyaan	Korelasi Pearson	Keterangan
1	0,674	Valid
2	0,746	Valid
3	0,778	Valid
4	0,702	Valid
5	0,660	Valid
6	0,536	Valid
7	0,677	Valid
8	0,548	Valid

Dari hasil analisis antara masing-masing skor pertanyaan hasil yang bisa diperoleh adalah:

- Koefisien korelasi untuk pertanyaan 1 sampai dengan 8 nilainya lebih besar dari 0,223 (tabel r dengan  $n = 78$ ) sehingga dapat disimpulkan butir instrument tersebut valid
- Semua butir pertanyaan berkorelasi positif maka kesimpulan yang bisa diambil adalah kuesioner Akuntabilitas Publik memiliki instrumen yang valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal dengan koefisien Cronbach's alpha. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1.4, tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Pengujian Reliabilitas SPSS 19.0 Variabel X

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	10

Dari tabel di atas, dapat dilihat besarnya koefisien Cronbach's alpha variabel implementasi DIPA adalah 0,733 artinya konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sebesar 73,3% dapat dipercaya. Untuk besarnya koefisien Cronbach's alpha variabel akuntabilitas publik adalah 0,733 artinya konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sebesar 73,3% dapat dipercaya.

Tabel 1.5. Pengujian Reliabilitas SPSS 19.0 Variabel Y

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	8

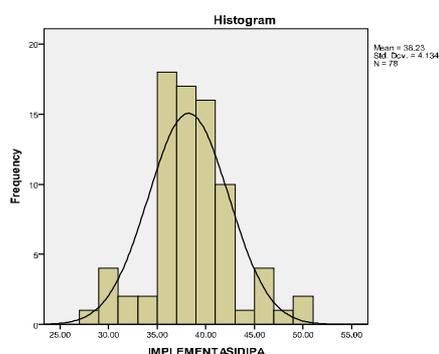
Dari tabel di atas, dapat dilihat besarnya koefisien Cronbach's alpha variabel Akuntabilitas Publik adalah 0,821 artinya konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner 82,1% dapat dipercaya. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner untuk kedua variabel-variabel dalam penelitian ini juga dinilai reliabel karena besarnya koefisien Cronbach's alpha berada diatas 0,223 (tabel r dengan n =78) atau 22,3%.

### Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menguji normalitas distribusi data, penulis menggunakan grafik distribusi. Hasil grafik distribusi variabel Implementasi DIPA disajikan pada tabel 1.6 dan gambar 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.6. Statistik Distribusi Data dengan SPSS 19.0

IMPLEMENTASIDIPA		
N	Valid	78
	Missing	0
Mean		38.2308
Median		38.0000
Mode		38.00
Std. Deviation		4.13387
Variance		17.089
Skewness		.183
Std. Error of Skewness		.272
Kurtosis		.885
Std. Error of Kurtosis		.538
Range		22.00
Minimum		28.00
Maximum		50.00
Sum		2982.00



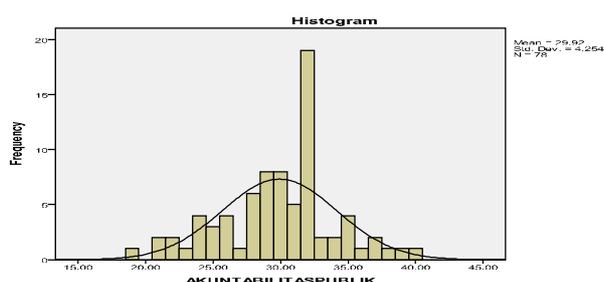
Gambar 1.2. Grafik Distribusi Residual

Dari hasil rasio skewness variabel Implementasi DIPA sebesar 0,673 dan rasio kurtosis sebesar 1,645 berada pada kisaran -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kurva Implementasi DIPA adalah normal.

Hasil grafik ditribusi variabel Akuntabilitas Publik disajikan pada tabel 1.7 dan gambar 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.7. Statistik Distribusi Data dengan SPSS 19.0

AKUNTABILITAS PUBLIK		
N	Valid	78
	Missing	0
Mean		29.9231
Median		30.0000
Mode		32.00
Std. Deviation		4.25416
Variance		18.098
Skewness		-.248
Std. Error of Skewness		.272
Kurtosis		.153
Std. Error of Kurtosis		.538
Range		21.00
Minimum		19.00
Maximum		40.00
Sum		2334.00



Gambar 1.3. Garfik Distribusi Variabel Y

Dari hasil rasio skewness variabel Akuntabilitas Publik sebesar -0,739 dan rasio kurtosis sebesar 0,178 berada pada kisaran -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kurva Akuntabilitas Publik adalah normal.

### Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana variabel pengaruh Implementasi DIPA terhadap Akuntabilitas Publik disajikan pada tabel 1.8 sebagai berikut:

**Tabel 1.8. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.676	3.381		1.087	.280
	IMPLEMENTASIDIP A	.687	.088	.667	7.807	.000

a. Dependent Variable: AKUNTABILITASPUBLIK

Konstanta sebesar 1,087 artinya jika implementasi DIPA(X) nilainya 0 adalah maka Akuntabilitas Publik (Y') nilainya positif yaitu 1,087.

- Koefisien regresi Implementasi DIPA (X) sebesar 0,667 artinya jika Implementasi DIPA mengalami peningkatan sebesar 1, maka Akuntabilitas Publik (Y') mengalami peningkatan sebesar 0,667.
- Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Implementasi DIPA dengan Akuntabilitas Publik, semakin baik Implementasi DIPA maka semakin meningkat Akuntabilitas Publik.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 1.8 diperoleh t hitung sebesar 8,887. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$  atau  $78-2-1 = 75$  (n adalah jumlah kasus, k adalah jumlah variabel). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,992. Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $8,887 > 1,992$ ) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  artinya bahwa implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

Meskipun implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Kantor Pusat LPP TVRI, tetapi harus diakui bahwa implementasi DIPA di Kantor Pusat LPP TVRI saat ini belum sepenuhnya sempurna. Hal itu tersebut dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel Implementasi DIPA menunjukkan total skor jawaban responden sebesar 38,23 dari skor maksimum sebesar 50. Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan responden dalam lembar kuesioner, banyak kendala yang dihadapi Kantor Pusat LPP TVRI dalam Implementasi DIPA. Salah satunya adalah Implementasi DIPA belum berjalan sebagaimana mestinya karena alokasi dana sering terlambat keluar/dicairkan karena dana baru bisa dicairkan setelah kegiatan dilaksanakan. Hal ini terjadi karena kurang kepatuhan pengelola DIPA dalam melaksanakan mekanisme pencairan dana DIPA yang telah ditetapkan. Pengelola DIPA dalam melaksanakan mekanisme pencairan dana DIPA masih berpedoman pada sistem yang lama karena belum memahami sistem yang baru.

Untuk Akuntabilitas publik sudah cukup baik tetapi belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel akuntabilitas publik mempunyai skor jawaban responden 29,92 dari nilai maksimum 40. Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas Publik dapat dilihat bahwa jawaban responden menyebar untuk jawaban 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mereka

sendiri akuntabilitas publik belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terutama berkaitan dengan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban. Padahal pelaksanaan laporan pertanggungjawaban merupakan indikator yang sangat penting untuk menunjang peningkatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan negara.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Implementasi DIPA sebagai bagian laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Kantor Pusat LPP TVRI dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel X menunjukkan nilai sebesar 38,23 dari skor maksimum sebesar 50 sedangkan dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel Y nilai sebesar 29,92 dari nilai maksimum 40. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja melalui DIPA belum sempurna dilaksanakan disebabkan kendala kurang pemahaman pihak pengelola DIPA Kantor Pusat LPP TVRI yang perlu diberikan pendidikan dan pelatihan keuangan mengenai DIPA oleh Kementerian Keuangan RI
- 2) Implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai bagian laporan keuangan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) Pusat Jakarta, dengan konstanta sebesar 1,087 dan Koefisien regresi sebesar 0,667 (positif).

## Saran

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) khususnya pengelola DIPA diharapkan secara terus menerus dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi DIPA LPP TVRI, dengan cara memperbaiki elemen-elemen pendukung dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Semakin baik implementasi DIPA maka Akuntabilitas Publik akan semakin baik khususnya di Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Salemba Empat:Jakarta.
- Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, 2002, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri*.
- Cooper R Donald, Pamela S Schindler, 2006, *Metode Riset Bisnis Volume 1*, McGraw-Hill Irwin.
- Cooper R Donald, Pamela S Schindler, 2006, *Metode Riset Bisnis Volume 2*, McGraw-Hill Irwin.
- Departemen Keuangan, 2011, *Pokok-Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- Departemen keuangan, 2011, *Pencairan Anggaran Belanja Negara*, Departemen Keuangan
- Departemen Keuangan, 2011, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2011 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Dwiningsih, 2006, *Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tidak dipublikasi).
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 5*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Najmudin, Mohamad, 2003, *Anggaran Perusahaan Edisi 1*, BPFE UGM Yogyakarta.
- Guy Peters, 2000, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Hansen, Mowen, 2009, *Akuntansi Manajerial*, Salemba Empat: Jakarta.
- Iswardono, 2001, *Sekelumit Analisa Regresi dan Korelasi*, BPFE UGM Yogyakarta.
- Krina, Lalolo Ioina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta
- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1*, AKIP, Jakarta.
- Lind A Douglas William G Marchal, Samuel A Wathen, 2005, *Statistical Techniques in Business Economics*, McGraw-Hill
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIP YKPN.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2000, *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Priyantno, Dwi, 2008, *Mandiri Belajar SPSS*, MediaKom
- Purbayu, Ashari, 2005, *Analisis Statistik dengan Microsoft excel dan SPSS*, Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Sugiyanto, 2004, *Analisa Statistika Sosial*, Bayu Media: Jawa Timur.
- Suryadhi, Joko, 2007, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Teodorus Parhusip, Poltak, 2007, *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terjadi pemekaran*, Skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (Tidak dipublikasi).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *Reformasi Administrasi Publik*, Jakarta: MIA- UNKRIS.